



AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI LAPORAN KEUANGAN DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH (ZIS) PADA LEMBAGA BAITUL MAL KOTA SUBULUSSALAM

¹⁾Irhamuddin, ¹⁾Shita Tiara, ¹⁾Reza Hanafi Lubis, ¹⁾Ratna Sari Dewi

¹⁾Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muslim Nusantara Al-Washliyah

E-mail: ^{*}irhamuddin@umnaw.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Lembaga Baitul Mal Kota Subulussalam. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan dengan memanfaatkan dokumen keuangan periode 2023–2025 serta informasi dari informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Subulussalam telah menerapkan akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan secara periodik, pencatatan transaksi berdasarkan dokumen pendukung, pelaporan kepada pemerintah daerah, dan mekanisme pengawasan. Laporan keuangan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Namun, apabila dianalisis berdasarkan PSAK 409 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah, penyajian tersebut belum sepenuhnya sesuai karena belum menyajikan Laporan Perubahan Dana serta belum memisahkan dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara tersendiri. Dari aspek transparansi, informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian ZIS telah tersedia melalui media informasi dan website lembaga, tetapi kelengkapan dan pembaruan informasi keuangan publik masih perlu ditingkatkan. Penelitian merekomendasikan penyesuaian antara pelaporan berbasis pemerintahan dan kebutuhan informasi khusus pengelolaan ZIS berdasarkan PSAK 409.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Transparansi; Laporan Keuangan; Zakat, Infak, Sedekah; PSAK 409; Baitul Mal.

ABSTRACT

This study aims to analyze the accountability and transparency of financial reporting in the management of zakat, infaq, and sadaqah (ZIS) at Baitul Mal of Subulussalam City. The study employed a descriptive qualitative approach. Data were collected through interviews, documentation, and literature review, with financial documents for the 2023–2025 period and information from relevant informants used as the main sources. The findings show that Baitul Mal of Subulussalam City has implemented accountability through periodic financial reporting, transaction documentation, reporting to the local government, and oversight mechanisms. The institution prepares financial statements consisting of a statement of financial position, operational report, statement of changes in equity, cash flow statement, and notes to the financial statements based on Government Accounting Standards (SAP). However, when assessed against PSAK 409 on Zakat, Infaq, and Sadaqah Accounting, the presentation is not yet fully aligned because a statement of changes in funds has not been presented and zakat funds, infaq/sadaqah funds, and amil funds have not been separately presented.



Transparency has been supported by the availability of information on ZIS collection and distribution through the institution's information media and website, although the completeness and periodic updating of public financial information still need improvement. The study recommends harmonizing government reporting requirements with ZIS-specific accounting information under PSAK 409.

Keywords: *Accountability; Transparency; Financial Statements; Zakat, Infaq, Sadaqah; PSAK 409; Baitul Mal.*

I. PENDAHULUAN

Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) merupakan instrumen filantropi Islam yang memiliki fungsi keagamaan sekaligus sosial-ekonomi. Pengelolaan ZIS yang baik dapat mendukung redistribusi pendapatan, pemberdayaan ekonomi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena dana yang dikelola berasal dari masyarakat dan ditujukan kepada pihak yang berhak, lembaga pengelola ZIS dituntut menjalankan tata kelola yang amanah, akuntabel, transparan, dan professional (Safitri et al., 2024).

Akuntabilitas dan transparansi menjadi bagian penting dari good governance. Akuntabilitas menuntut lembaga mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya kepada pihak yang memiliki hak untuk memperoleh pertanggungjawaban. Transparansi menuntut keterbukaan informasi yang relevan, mudah dipahami, dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan (Sabili et al., 2023; Handayani, 2025). Dalam lembaga zakat, kedua prinsip tersebut berkaitan erat dengan kepercayaan masyarakat dan keputusan muzakki untuk menyalurkan dana melalui lembaga resmi (Putri et al., 2022)

Pada sisi akuntansi, PSAK 409 memberikan pedoman khusus mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, dan sedekah. Penerapan standar tersebut penting agar pengguna laporan dapat mengetahui sumber penerimaan, penggunaan, dan saldo dana berdasarkan karakteristik masing-masing. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat pada lembaga pengelola ZIS masih menghadapi kendala, terutama pada penyajian dan pengungkapan (Rahma et al., 2025)

Baitul Mal Kota Subulussalam memiliki karakteristik kelembagaan yang berbeda dari lembaga zakat nasional karena berada dalam lingkungan pemerintahan daerah Aceh. Lembaga ini berperan dalam menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan ZIS untuk masyarakat di wilayah Kota Subulussalam. Karakteristik tersebut menimbulkan kebutuhan untuk melihat bagaimana



prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan sekaligus bagaimana penyajian laporan keuangannya dibandingkan dengan ketentuan PSAK 409.

Penelitian ini penting karena kajian mengenai akuntabilitas dan transparansi ZIS lebih banyak dilakukan pada lembaga zakat nasional atau menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menguji kepercayaan dan minat muzakki. Penelitian ini berfokus pada praktik pelaporan keuangan di tingkat daerah melalui studi pada Baitul Mal Kota Subulussalam. Tujuan penelitian adalah menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan ZIS serta mengidentifikasi kesesuaian penyajian laporan dengan karakteristik PSAK 409.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk memberikan penjelasan, laporan, dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban. Dalam pelaporan keuangan, akuntabilitas tercermin melalui pencatatan transaksi yang dapat ditelusuri, penyusunan laporan secara periodik, penyediaan bukti pendukung, kepatuhan terhadap standar, serta adanya pengawasan (Naufal & Syafina, 2024).

2.2 Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan organisasi dalam menyediakan informasi yang relevan, jelas, tepat waktu, dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Pada lembaga pengelola ZIS, transparansi mencakup informasi mengenai penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, serta laporan keuangan. Keterbukaan tersebut dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga (Trisakti et al., 2021).

2.3 Pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah

Pengelolaan ZIS mencakup kegiatan penghimpunan, pencatatan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana kepada pihak yang berhak. Pengelolaan yang efektif harus memperhatikan prinsip syariah, ketepatan sasaran, administrasi yang tertib, dan pertanggungjawaban kepada masyarakat (Amalia & Rama, 2023).



2.4 PSAK 409 dan Penyajian Laporan Keuangan ZIS

PSAK 409 menjadi acuan khusus bagi entitas yang mengelola zakat, infak, dan sedekah. Dalam konteks penelitian ini, perhatian utama diarahkan pada penyajian informasi mengenai dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, serta laporan perubahan dana. Ketidakterpisahan informasi tersebut dapat mengurangi kemampuan pengguna laporan untuk menilai sumber dan penggunaan dana secara spesifik (Rahma et al., 2025)

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif untuk menganalisis akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah (ZIS) pada Baitul Mal Kota Subulussalam. Subjek penelitian adalah laporan keuangan ZIS pada Baitul Mal Kota Subulussalam, sedangkan objek penelitian adalah akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS. Analisis dilakukan terhadap pengelolaan dan laporan keuangan periode 2023–2025 serta informasi yang diperoleh dari informan penelitian.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan dalam pengelolaan serta pelaporan keuangan ZIS, yaitu pihak pimpinan/pengelola keuangan dan muzakki. Dokumentasi penelitian menunjukkan adanya wawancara dengan Bendahara Baitul Mal Kota Subulussalam, staf Baitul Mal, dan muzakki pada Juni 2026. Data sekunder berupa dokumen laporan keuangan dan data pengelolaan ZIS periode 2023–2025.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara menggunakan pertanyaan terbuka sehingga peneliti dapat mengembangkan pertanyaan berdasarkan jawaban informan untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Observasi dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian, sedangkan dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan laporan keuangan, data penghimpunan dan pendistribusian ZIS, serta dokumen pendukung lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dikelompokkan berdasarkan tema penelitian, yaitu akuntabilitas, transparansi, pengelolaan ZIS, dan penyajian laporan

keuangan. Selanjutnya, temuan wawancara dan dokumentasi dibandingkan untuk melihat konsistensi informasi, kemudian penyajian laporan keuangan dianalisis berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi serta karakteristik penyajian laporan keuangan berdasarkan PSAK 409.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil

Baitul Mal Kota Subulussalam merupakan lembaga resmi yang memiliki kewenangan mengelola zakat, infak, sedekah, dan harta keagamaan lainnya di wilayah Kota Subulussalam. Kegiatan pengelolaan meliputi penghimpunan, pencatatan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana kepada mustahik. Hasil wawancara menunjukkan bahwa penghimpunan dilakukan melalui masyarakat, ASN, BUMN/BUMD, serta pihak lain yang memenuhi ketentuan sebagai muzakki. Dana yang diterima dicatat dan direkap oleh bagian terkait sebelum didistribusikan.

	Pengumpulan ZIS (Rp)	Perubahan
2023	4.065.783.432	-
2024	4.455.754.654	+9,59%
2025	3.753.473.477	-15,76%

Tabel 1. Pengumpulan ZIS Tahun 2023-2025

Data tersebut menunjukkan bahwa penghimpunan ZIS meningkat pada 2024, kemudian menurun pada 2025. Perubahan jumlah penghimpunan menunjukkan pentingnya penyajian informasi yang konsisten dan periodik agar masyarakat dapat menilai perkembangan pengelolaan dana.

Tahun	Total Penyaluran (Rp)
2023	3.519.560.919
2024	3.767.419.055
2025	3.791.918.638
Total 2023-2025	11.078.898.612

Tabel 2. Penyaluran ZIS Tahun 2023-2025

Penyaluran ZIS dilakukan berdasarkan ketentuan asnaf dengan proses verifikasi administrasi dan survei lapangan. Program penyaluran mencakup bantuan bagi fakir dan miskin, disabilitas, gharimin, mualaf, ibnu sabil, fisabilillah, serta dukungan produktif seperti modal usaha. Mekanisme verifikasi dan dokumentasi penerima menunjukkan adanya upaya menjaga ketepatan sasaran dan pertanggungjawaban penggunaan dana.



Dalam penyusunan laporan keuangan, Baitul Mal Kota Subulussalam menggunakan Standar Akuntansi Pemerintahan. Laporan yang disusun meliputi Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, serta didukung informasi anggaran dan realisasi. Sejak 2024 penyusunan laporan keuangan juga didukung aplikasi digital.

4.2 Akuntabilitas Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS pada Baitul Mal Kota Subulussalam telah diterapkan melalui pencatatan transaksi penerimaan dan pengeluaran, penyusunan laporan keuangan secara periodik, serta pelaporan kepada pemerintah daerah. Setiap dana yang dihimpun dari muzakki dan dana yang disalurkan kepada mustahik dicatat oleh pihak pengelola. Hal tersebut menunjukkan adanya mekanisme pertanggungjawaban atas penerimaan dan penggunaan dana ZIS. Penerapan tersebut menunjukkan bahwa Baitul Mal telah memenuhi fungsi akuntabilitas dalam kerangka pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sesuai dengan teori Sabili et al., (2023) bahwa Akuntabilitas merupakan suatu bentuk tuntutan pertanggungjawaban kepada suatu entitas atas tugas dan kewajiban yang dijalankannya, khususnya dalam pengelolaan dan pengawasan keuangan organisasi.

Namun, akuntabilitas dalam pengelolaan ZIS tidak hanya berkaitan dengan keberadaan laporan keuangan, tetapi juga dengan kemampuan laporan tersebut memberikan informasi yang spesifik mengenai masing-masing dana. Hasil analisis menunjukkan bahwa laporan keuangan Baitul Mal masih menggunakan basis SAP sehingga belum menyajikan Laporan Perubahan Dana sebagaimana karakteristik PSAK 409. Selain itu, dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil belum disajikan secara terpisah dalam laporan keuangan.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara akuntabilitas dalam perspektif pelaporan pemerintah daerah dan kebutuhan akuntabilitas sebagai lembaga pengelola ZIS. Laporan berbasis SAP telah memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban sebagai bagian dari pemerintah daerah, tetapi informasi yang dihasilkan belum sepenuhnya menunjukkan perubahan dan penggunaan masing-masing jenis dana ZIS secara khusus. Dengan demikian, penyesuaian penyajian informasi berdasarkan karakteristik PSAK 409 dapat memperkuat akuntabilitas kepada muzakki, masyarakat, dan pihak berkepentingan lainnya.



4.3 Transparansi Laporan Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Baitul Mal Kota Subulussalam telah berupaya menerapkan transparansi melalui penyampaian informasi mengenai pengelolaan ZIS. Berdasarkan wawancara dengan Kasubbag Keuangan dan Program, informasi mengenai laporan keuangan dapat diakses melalui website, sedangkan informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian ZIS juga disampaikan melalui papan informasi.

Ketersediaan informasi tersebut menunjukkan adanya upaya Baitul Mal dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat. Transparansi juga didukung oleh penyusunan laporan keuangan secara periodik dan dokumentasi atas penerimaan serta pendistribusian dana. Dengan adanya informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran, masyarakat memiliki sarana untuk mengetahui kegiatan pengelolaan ZIS yang dilakukan oleh lembaga.

Namun, transparansi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya media informasi, tetapi juga oleh kelengkapan, keterbaruan, dan kemudahan pemahaman informasi. Dalam konteks pengelolaan ZIS, informasi mengenai jumlah dana yang dihimpun dan disalurkan perlu disertai informasi yang lebih spesifik mengenai jenis dana, saldo, serta penggunaannya. Hasil analisis berdasarkan PSAK 409 menunjukkan bahwa dana zakat, infak/sedekah, dan amil belum dipisahkan secara khusus dalam penyajian laporan keuangan. Kondisi ini menyebabkan informasi yang tersedia belum sepenuhnya menggambarkan perubahan masing-masing jenis dana secara spesifik.

Dengan demikian, transparansi Baitul Mal Kota Subulussalam dapat dikatakan telah diterapkan dari sisi keterbukaan dan akses informasi, tetapi masih dapat ditingkatkan dari sisi kualitas informasi yang disampaikan. Penyajian informasi yang lebih rinci dan diperbarui secara berkala akan membantu masyarakat dan muzakki memahami bagaimana dana ZIS dihimpun, disalurkan, dan dikelola. Temuan ini sejalan dengan Narulitasari & Piliyanti, (2024) yang menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan lembaga zakat melalui media digital masih menjadi tantangan.

4.4 Analisis Kesesuaian dengan PSAK 409

Aspek	Kondisi pada Baitul Mal	Penilaian
Dasar pelaporan	Mengacu pada SAP karena bagian dari lingkungan pemerintah daerah	Sesuai dengan kerangka kelembagaan
Komponen laporan	Neraca, LO, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, CaLK, dan informasi anggaran	Sebagian dapat dibandingkan
Laporan Perubahan Dana	Belum disajikan sebagai laporan khusus ZIS	Belum sesuai
Pemisahan dana	Dana zakat, infak/sedekah, dan amil belum disajikan secara terpisah dalam format khusus ZIS	Belum sesuai
Akuntabilitas	Pencatatan, bukti transaksi, laporan periodik, dan pengawasan tersedia	Telah diterapkan
Transparansi	Informasi penghimpunan dan pendistribusian tersedia melalui media lembaga	Telah diterapkan, perlu penguatan

Tabel 3. Analisis Kesesuaian dengan PSAK 409

Perbedaan utama antara praktik pelaporan Baitul Mal dan karakteristik PSAK 409 bukan semata-mata menunjukkan kesalahan administratif, tetapi mencerminkan perbedaan tujuan dan basis pelaporan. SAP digunakan karena Baitul Mal berada dalam struktur pemerintahan daerah, sedangkan PSAK 409 menekankan karakteristik dana ZIS dan kebutuhan pengguna informasi zakat. Oleh sebab itu, penyelarasan informasi ZIS dengan format pelaporan pemerintah dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat akuntabilitas sekaligus transparansi.

Temuan penelitian juga mendukung (Mutya & Maulina, 2025) bahwa kualitas akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana zakat perlu dilihat dari perspektif akuntansi sektor publik sekaligus karakteristik akuntansi Islam. Dengan pemisahan informasi dana dan pengungkapan yang lebih lengkap, masyarakat dan muzakki akan lebih mudah mengevaluasi penggunaan dana serta memahami hasil pengelolaan ZIS.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, Baitul Mal Kota Subulussalam telah menerapkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan ZIS melalui pencatatan transaksi, penyusunan laporan keuangan secara periodik, serta penyampaian informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana kepada pihak yang berkepentingan. Penyusunan laporan keuangan juga telah dilakukan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai konsekuensi kedudukan Baitul Mal sebagai bagian dari pemerintah daerah.



Namun, apabila ditinjau berdasarkan karakteristik PSAK 409, penyajian laporan keuangan Baitul Mal Kota Subulussalam belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan pelaporan khusus lembaga pengelola ZIS. Hal tersebut terutama terlihat dari belum disajikannya Laporan Perubahan Dana serta belum dipisahkannya dana zakat, dana infak/sedekah, dan dana amil secara khusus. Perbedaan tersebut lebih berkaitan dengan penggunaan basis pelaporan SAP daripada kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan.

Dari sisi transparansi, ketersediaan informasi melalui website dan papan informasi menunjukkan adanya keterbukaan kepada masyarakat. Namun, transparansi masih dapat ditingkatkan melalui penyajian informasi ZIS yang lebih rinci, mudah dipahami, diperbarui secara berkala, serta memuat informasi mengenai masing-masing jenis dana. Penyesuaian tersebut penting agar laporan keuangan tidak hanya memenuhi kebutuhan pertanggungjawaban pemerintah daerah, tetapi juga mampu menyediakan informasi yang lebih relevan bagi muzakki, masyarakat, dan pemangku kepentingan dalam menilai pengelolaan dana ZIS.

REFERENSI

- Amalia, I., & Rama, A. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah. In *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* (Vol. 3, Number 1).
- Mutya, M. A., & Maulina, I. (2025). Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Zakat dalam Perspektif Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Islam. *Journal of Public and Business Accounting (JoPBA)*, 6(1), 29–35. <https://doi.org/10.31328/jopba.v6i1>
- Narulitasari, D., & Piliyanti, I. (2024). ACCOUNTABILITY DISCLOSURE OF WEB-BASED AND PSAK 109 ZAKAT MANAGEMENT ORGANIZATIONS. *Business and Accounting Research (IJEBAAR) Peer Reviewed-International Journal*, 8. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAAR>
- Naufal, M., & Syafina, L. (2024). Penerapan Sistem Akuntabilitas dalam Penyusunan Laporan Keuangan Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Kantor Bupati Deli Serdang. *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 3(4), 266–273. <https://doi.org/10.54259/akua.v3i4.3277>
- Putri, R. A., Bahri, E. S., & Romansyah, D. (2022). Interests of Muzaki to Pay Zakat: The Role of Accountability, Transparency, Service Quality, and Financial Technology. *IQTISHADIA*, 15(1), 63. <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v15i1.10713>
- Rahma, D., Maharani, P., & Marzadi, H. (2025). *Analisis Penerapan Psak 109 Zakat, Infaq, Sedekah Dalam Penyajian Laporan Keuangan*.



- Sabili, F., Romansyah, D., & Hidayat, R. (2023). Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Masjid (Studi Kasus Masjid Jogokariyan Yogyakarta). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 233–249. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.626>
- Safitri, F. I., Maski, G., Noor, I., & Kuncoro, A. W. (2024). The Role of Zakat, Infaq and Shadaqah in Indonesia's Economic Growth: An Islamic Perspective. *Falah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(1), 17–30. <https://doi.org/10.22219/jes.v9i1.30217>
- Trisakti, F., Dikeu Dewi Berliana, A., Bukhori, A., Fitri, A., & Sunan Gunung Djati Bandung, U. (2021). TRANSPARANSI DAN KEPENTINGAN UMUM. In *Jurnal DIALEKTIKA : Jurnal Ilmu Sosial* (Vol. 19, Number 1). <http://jurnaldialektika.com>